



## Implikasi Aturan Bebas BMN Terhadap Penertiban Penatausahaan BMN Mengacu PMK 207/PMK.06/2021 (studi kasus Kementerian XYZ)

**Syaiful Ramadhan**

Biro Manajemen BMNP

BA 124

Alamat: Jl MH Thamrin No 8 Jakarta

Korespondensi penulis: [phunk.syaiful@gmail.com](mailto:phunk.syaiful@gmail.com)

**Abstract.** *The management of state property in the current era is no longer just administrative, but more advanced thinking in handling state assets and being able to formulate the needs of state property broadly comprehensive accurately and definitely and think how to increase efficiency, effectiveness and create added value in managing assets in order to create orderly management of BMN administrative, physical orderly and legal order. One of them is by regulating BMN carried out at the XYZ ministry, namely through free BMN. This research aims to reorganize state assets that have not been handled properly so that the administration of state assets becomes better and is able to provide the maximum benefit to the state. Based on the review of the free application of BMN to the BMN Administration Regulation, it has a positive impact, one of which is by increasing the percentage of inventory of goods found by 85.4%.*

**Keywords:** *State Property, Management, BMN free rules*

**Abstrak.** Pengelolaan barang milik negara pada era saat ini tidak lagi sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara serta mampu merumuskan kebutuhan barang milik negara secara luas komprehensif dengan akurat dan pasti serta berfikir bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset demi terciptanya pengelolaan BMN yang tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satunya dengan cara penertiban BMN yang dilakukan pada kementerian XYZ yaitu melalui bebas BMN. Penelitian ini bertujuan untuk menata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan baik agar penatausahaan aset negara menjadi lebih baik dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Berdasarkan peninjauan penerapan bebas BMN terhadap Penertiban Penatausahaan BMN memberikan dampak positif salah satunya dengan peningkatan persentase inventarisasi atas barang ditemukan sebesar 85,4 %.

**Kata kunci:** Barang Milik Negara, Pengelolaan, aturan bebas BMN.

### LATAR BELAKANG

Problematika pengelolaan aset negara yang muncul berkenaan dengan penggunaan aset yang perlu mendapat perhatian baik dari Pengelola Barang maupun Pengguna Barang yaitu berkaitan penataan yang tertib administrasi atas penggunaan aset negara dan juga pengamanan aset negara secara administrasi, fisik dan hukum. Artinya Koridor pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung kelancaran tugas, pokok dan fungsi instansi. Disamping itu, lebih lanjut seperti disinggung di atas, penanganan aset negara yang mengikuti kaidah-kaidah tata kelola yang baik akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam pengelolaan BMN.

Agar BMN dapat digunakan dengan optimal, maka Pemerintah menetapkan proses

pengelolaan BMN yang terdiri dari sebelas siklus, yaitu Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Hamdi, 2015). Disamping itu pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 menyebutkan tugas dan kewajiban Pengguna Barang yaitu diantaranya mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara, dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

Bentuk Pengawasan dan pengendalian BMN adalah dilakukannya pemantauan dan penertiban terhadap siklus pengelolaan BMN. Salah satu peran vital dari kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah.

Melihat ketentuan tersebut, salah satu bentuk kegiatan Pengawasan dan pengendalian BMN adalah dengan dilakukannya Penertiban atas penatausahaan dalam siklus pengelolaan BMN yang tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah.

Penertiban BMN yang dilakukan pada kementerian XYZ yaitu melalui bebas BMN dan harus dijadikan momentum untuk menata kembali aset negara yang selama ini masih belum tertangani dengan baik agar penatausahaan aset negara menjadi lebih baik dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara. Tantangan tersebut dapat diwujudkan, perlu kerja keras dari semua pihak mengingat problematika di seputar pengelolaan aset negara sekarang ini begitu kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara harus ditangani oleh SDM yang profesional dan handal, dan mengerti tata peraturan perundangan yang mengatur aset negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu efektifitas dari penerapan bebas BMN terhadap Penertiban Penatausahaan BMN mengacu PMK 207/PMK.06/2021.

## **KAJIAN TEORI**

Analisis pengelolaan BMN dan keefektifan Pengawasan dan Pengendalian dalam penggunaan sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dilakukan oleh Baghiz (2023) dimana menghasilkan simpulan efektifitas penerapan aplikasi SIMAS masih rendah

dalam pelaksanaan tugasnya, namun kualitas informasi yang dihasilkan tetap bermanfaat dalam hal pengawasan dan pengendalian.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Arif Wicaksana, dkk (2021) mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dari inventarisasi aset, penggunaan aset, dan pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset melalui utilisasi aset dimana pengamanan dan pemeliharaan aset berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan inventarisasi aset dan penggunaan aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Pengaruh langsung inventarisasi aset, penggunaan aset, keamanan aset, dan pemeliharaan terhadap optimalisasi aset menunjukkan bahwa persediaan aset dan keamanan aset berpengaruh signifikan dan positif terhadap optimalisasi aset, sedangkan penggunaan aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Selain itu, pemanfaatan aset berpengaruh signifikan terhadap signifikan dan positif terhadap optimalisasi aset. Selain itu menurut Agustina (2017) menyatakan bahwa pembuktian atas pengaruh yang positif dan signifikan antara inventarisasi aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) dalam penelitian ini tidak terbukti, karena memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan namun pembuktian atas pengaruh yang positif antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) dalam penelitian ini terbukti, Karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011, hlm. 60), Kajian dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berbasis studi kasus, yang mana metode ini digunakan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena yang terjadi dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lingkungan Kementerian XYZ. Dalam mendapatkan data menggunakan rekapitulasi permohonan ajuan bebas BMN selama periode Tahun Anggaran 2023 sebagai data primer untuk selanjutnya di sandingkan efektifitasnya dengan progres inventarisasi sebagai salah satu kegiatan penertiban penatausahaan BMN. Dalam melakukan analisa data menggunakan metode analisis kualitatif Miles dan Huberman, yaitu dengan menggunakan a) analisis reduksi data, yaitu Pemilihan data dilakukan melalui dokumen usulan permohonan Bebas BMN; b) Penyajian Data, untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis dampak efektifitas aturan surat

bebas BMN di lingkungan Kementerian XYZ; c) Penarikan Kesimpulan, dengan cara menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berangkat dari integrasi entitas menjadi kementerian XYZ yang berakibat BMN dari masing-masing entitas menjadi satu kesatuan pencatatan namun identifikasi atas BMN belum dilaksanakan. Untuk menyasiasi fenomena yang terjadi berkaitan dengan tuntutan peningkatan persentase inventarisasi menyeluruh, terbit Surat Keputusan Nomor 105/II.2/HK/2023 tentang pedoman penerbitan surat bebas barang milik negara. mulai awal tahun 2023 dilakukan pelaksanaan inventarisasi menyeluruh sampai dengan 31 Desember 2023 terhadap semua aset sejalan dengan permohonan peningkatan penerbitan bebas BMN. Tingginya penerapan atas aturan bebas BMN dapat terlihat pada tabel 1. Rekapitulasi permohonan Bebas BMN.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Bebas BMN

1	Timestamp	NIP (Nomor Induk Pegawai) Petugas BMN	Nama Lengkap Pegawai Pengusul Bebas BMN	Upload Surat Pernyataan (bermaterai dar	Nomor Surat Bebas BMN	Kroscek	File Surat Bebas BMN acc	Arsip Surat Pernyataan Pegawai
2	8/16/2023 10:22:56		A001	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-4627/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
3	8/16/2023 14:13:56		A002	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-4629/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
4	8/16/2023 15:08:52		A003	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-4616/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
121	10/12/2023 14:27:13		A120	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-5923/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
122	10/12/2023 15:11:45		A121	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-5989/II.2.4/PL.02.0	FALSE		FALSE
123	10/12/2023 15:19:26		A122	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-5990/II.2.4/PL.02.0	FALSE		FALSE
124	10/12/2023 15:23:33		A123	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-5991/II.2.4/PL.02.0	FALSE		FALSE
125	10/12/2023 15:26:25		A124	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	dobel	FALSE		TRUE
126	10/12/2023 15:29:56		A125	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	dobel	FALSE		TRUE
127	10/16/2023 9:32:46		A126	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	dobel	FALSE		TRUE
128	10/16/2023 18:57:04		A127	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6170/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
129	10/17/2023 8:00:18		A128	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6250/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
130	10/17/2023 13:03:30		A129	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6018/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
131	10/17/2023 13:10:38		A130	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-7459/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
132	10/17/2023 14:04:10		A131	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6030/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
133	10/17/2023 18:52:12		A132	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6401/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
134	10/18/2023 12:44:50		A133	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6419/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
135	10/19/2023 10:03:34		A134	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6080/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
136	10/23/2023 10:27:17		A135	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6154/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
137	10/23/2023 10:38:35		A136	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	dobel	FALSE		TRUE
138	10/23/2023 12:49:53		A137	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6156/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
139	10/23/2023 12:53:30		A138	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	dobel	FALSE		TRUE
140	10/23/2023 14:52:53		A139	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-6270/II.2.4/PL.02.0	TRUE	<a href="https://drive.google.co">https://drive.google.co</a>	TRUE
370	4/29/2023 12:08:48		A369	<a href="https://drive.google.c">https://drive.google.c</a>	B-2086/II.2.4/PL.02.0	FALSE		FALSE

Pada rekapan dapat terlihat jumlah pengajuan selama periode Tahun Anggaran 2023 sebanyak 289 surat permohonan yang berhasil diterbitkan dari 370 usulan, berbanding terbalik dengan periode sebelum terbit aturan bebas BMN yaitu nihil.

Sehingga dapat dikatakan dengan adanya aturan bebas BMN pada Kementerian XYZ, memberikan dampak positif dan meningkatkan efektifitas terhadap kegiatan penertiban penatausahaan pada siklus pengawasan dan pengendalian BMN, salah satu faktor pembuktiannya pada tabel 2 Kertas Kerja Inventarisasi atas kegiatan inventarisasi yang berhasil teridentifikasi selama periode TA 2023 adalah sebesar

Rp.79.291.785.711.278.00 dari seluruh nilai perolehan BMN (Aset Tetap, KDP dan ATB) senilai Rp.88.151.113.678.668,00.

Tabel 2. Kertas Kerja Inventarisasi

No	Golongan	Total Aset		Aset telah inventarisasi		% NUP
		Kuantitas	Nilai Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan	
1	Tanah	549		549		100,00
2	Peralatan dan Mesin	436.678		373.112		85,44
3	Gedung dan Bangunan	4.085		4.085		100,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.430		672		46,99
5	Aset Tetap Lainnya (ATL)	781.449		404		0,05
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	179		179		100
7	Aset Tak Berwujud (ATB)	6.908		2.648		38,33
<b>JUMLAH</b>		<b>1.231.278</b>	<b>88.151.113.678.668</b>	<b>381.649</b>	<b>79.291.785.711.278</b>	

Ini dapat sinergi karena semua unit bahu membahu dalam pelaksanaan penerapan aturan. Hasil peninjauan atas penerapan aturan Bebas BMN ini sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN dalam hal penertiban BMN yaitu:

- a. dari siklus Penatausahaan BMN kegiatan Pembukuan, BMN dicatat sesuai kondisi seharusnya karena pegawai yang menggunakan BMN tersebut lebih interaktif untuk menyampaikan kondisi barang atas BMN yang melekat.
- b. dari siklus Penatausahaan BMN kegiatan inventarisasi, terjadi peningkatan persentase inventarisasi atas barang yang berhasil teridentifikasi dan ditemukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta

hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Berdasarkan penguraian proses-proses terhadap Implikasi Aturan Bebas BMN berdasarkan Penertiban Penatausahaan BMN dapat disimpulkan bahwa penerapan bebas BMN memberikan dampak positif dengan tingginya antusias permohonan bebas BMN yang berhasil diterbitkan dibandingkan periode sebelumnya sebanyak nihil selama periode Tahun Anggaran 2023. Disamping itu atas penerapan aturan Bebas BMN menjadikan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN dalam hal penertiban atas penatausahaan berjalan maksimal dan efektif. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengawasan dan pengendalian atas keseluruhan siklus pengelolaan BMN dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Pengguna Barang harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian aset tetap secara periodik agar masalah-masalah pengelolaan BMN dapat dibenahi.

## DAFTAR REFERENSI

- Antoh, Agustina Ester. (2017). Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai). *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2).
- Christofik, Baghiz Maturafif. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Keefektifan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Strategis (SIMAS) Dikbud Sebagai Pengguna Barang. [Disertasi]. Universitas Islam Indonesia.
- Hamdi. (2015). Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Kementerian Keuangan. (2021). PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor 207 / PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian BMN. Diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan/detail/410/Peraturan-Menteri-Keuangan-Nomor-207PMK062021.html> pada 1 Mei 2024.
- Kermite, Zadrak Romeo, Septo Pawelas Arso, & Nurhasmadiar Nandini. (2021). Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip*, 9(4), 523-528.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diunduh dari <https://peraturan.go.id/id/pp-no-27-tahun-2014> pada 1 Mei 2024.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Diunduh dari <https://peraturan.go.id/id/pp-no-28-tahun-2020> pada 1 Mei 2024.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Diunduh dari <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-78-tahun-2021> pada 1 Mei 2024.

Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.

Wicaksana, Arif, Harmono Harmono, & Sari Yuniarti. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 1-14.